

# RENCANA AKSI KEGIATAN TA 2020 - 2024 (Revisi Tahun 2022)



**Kantor Kesehatan Pelabuhan  
Kelas II Palembang**

 [www.kkppalembang.com](http://www.kkppalembang.com)  
 [kkppalembang@gmail.com](mailto:kkppalembang@gmail.com)  
 0711 420 103  
 @kkppalembang

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Kondisi Umum.....	2
C. Potensi dan Permasalahan .....	8
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	
A. Visi dan Misi.....	11
B. Tujuan .....	11
C. Sasaran Strategis .....	12
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI</b>	
A. Arah Kebijakan .....	13
B. Strategi .....	13
C. Kerangka Regulasi .....	13
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KEGIATAN</b>	
A. Target Kinerja .....	16
B. Kegiatan .....	17
C. Kerangka Pendanaan .....	21
<b>BAB V PENUTUP</b>	
Penutup .....	23
<b>LAMPIRAN</b> .....	24

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Jenis Jabatan Fungsional KKP Palembang Tahun 2021 .....	3
1.2 Jenis Jabatan Pelaksana KKP Palembang Tahun 2021 .....	4
4.1 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang 2020-2024 .....	16
4.2 Kerangka Pendanaan .....	22

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021 ..	5
1.2 Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	5
1.3 Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021 .....	6
1.4 Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Golongan Tahun 2021 .....	6
1.5 Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang.....	7

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Penanggungjawab Kegiatan .....	24
2. Matriks Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2020-2024.....	25

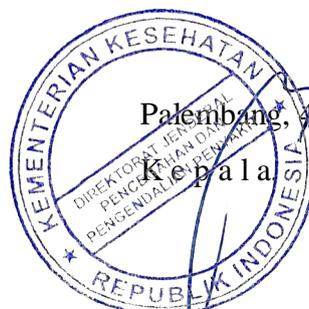
## KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang tahun 2020-2024 Revisi 2022 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Bagi Subbagian dan substansi pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang, diharapkan RAK 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.



Palembang, 4 Januari 2022

Kepala

Emmilya Rosa, SKM, MKM  
NIP.197305251997032001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan visi presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaaan.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

## **B. Kondisi Umum**

### **1) Gambaran Umum**

Secara umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang pada tahun 2019 telah berhasil merealisasikan kegiatan yang merupakan penjabaran dari program dan sasaran Direktorat Jenderal P2P untuk melakukan Penyelenggaraan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di pintu masuk negara. Secara umum seluruh pelaksanaan kegiatan tahun 2019 mencapai persentase rata-rata 132,21%, 4 (empat) dari 12 (dua belas) indikator kinerja pada tahun 2019 sudah tercapai sesuai target yang ada pada perjanjian kinerja, 6 (enam) dari 12 (dua belas) indikator tercapai melebihi target yang ada pada perjanjian kinerja, 2 (dua) indikator belum memenuhi target yaitu jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan (93,45%) karena adanya peraturan pemerintah yang mengizinkan pelayanan vaksinasi serta penerbitan ICV di klinik/rumah sakit yang memenuhi standar yang ditetapkan, 1 indikator kinerja lainnya adalah jumlah pengadaan sarana prasarana (97,56%) karena adanya wanprestasi penyedia jasa pada pengadaan 1 unit genset.

Di masa mendatang diharapkan meningkatnya kerjasama lintas sektoral dan membangun jejaring kerja yang lebih baik dan lebih solid dengan instansi yang terkait serta meningkatnya komitmen bersama, bersinergi yang kuat antar segenap pegawai dalam meningkatkan kinerja dan performa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang.

### **2) Sumber Daya Manusia**

Pegawai KKP Kelas II Palembang per tanggal 30 November 2021 sebanyak 80 (delapan puluh) orang termasuk di wilayah kerja, yang terdiri dari 1 (satu) orang jabatan administrator, 1 (satu) Orang Jabatan Pengawas, 52 (lima puluh dua) orang Jabatan Fungsional (JF), dan 26 (dua puluh enam) orang Jabatan Pelaksana (JP).

Adapun yang menjadi pejabat struktural saat ini adalah:

1. Kepala Kantor : Emmilya Rosa, SKM, MKM
2. Kepala Sub Bagian Administrasi & Umum : Rahmadi Sularso, S.Kom, M.Kes.

54 (lima puluh empat) orang pegawai Jabatan Fungsional (JF), dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1. Jenis Jabatan Fungsional KKP Palembang Tahun 2021**

No	Jenis Fungsional	Jumlah
1.	Dokter Ahli Madya	3 orang
2.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	1 orang
3.	Dokter Ahli Muda	7 orang
4.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1 orang
5.	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	3 orang
6.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	5 orang
7.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	1 orang
8.	Perawat Ahli Muda	1 orang
9.	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	3 orang
10.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	7 orang
11.	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	1 orang
12.	Pranata Komputer Ahli Pertama	1 orang
13.	Sanitarian Ahli Pertama	3 orang
14.	Pranata Keuangan APBN Mahir	1 orang
15.	Asisten Apoteker Penyelia	1 orang
16.	Perawat Penyelia	4 orang
17.	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	1 orang
18.	Perawat Mahir	1 orang
19.	Analisis Kepegawaian Terampil	1 orang
20.	Asisten Apoteker Terampil	1 orang
21.	Perawat Terampil	4 orang
22.	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1 orang
23.	Sanitarian Mahir	1 orang
23.	Sanitarian Terampil	1 orang

24(dua puluh enam) orang jabatan pelaksana, terdiri dari:

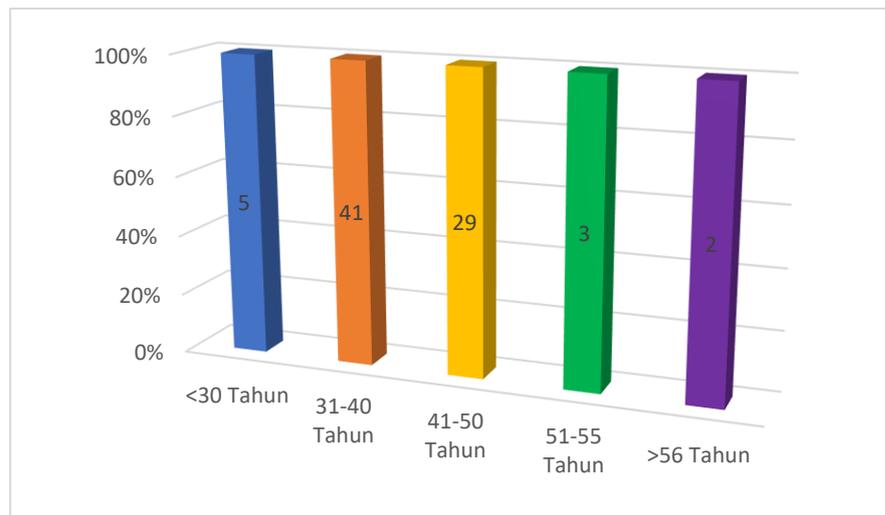
**Tabel 1.2. Jenis Jabatan Pelaksana KKP Palembang Tahun 2021**

No	Jenis Fungsional	Jumlah
1.	Dokter Ahli Madya	3 orang
2.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	1 orang
3.	Dokter Ahli Muda	7 orang
4.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1 orang
5.	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	3 orang
6.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	5 orang
7.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	1 orang
8.	Perawat Ahli Muda	1 orang
9.	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	3 orang
10.	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	7 orang
11.	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama	1 orang
12.	Pranata Komputer Ahli Pertama	1 orang
13.	Sanitarian Ahli Pertama	3 orang
14.	Pranata Keuangan APBN Mahir	1 orang
15.	Asisten Apoteker Penyelia	1 orang
16.	Perawat Penyelia	4 orang
17.	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	1 orang
18.	Perawat Mahir	1 orang
19.	Analisis Kepegawaian Terampil	1 orang
20.	Asisten Apoteker Terampil	1 orang
21.	Perawat Terampil	4 orang
22.	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	1 orang
23.	Sanitarian Mahir	1 orang
23.	Sanitarian Terampil	1 orang

Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang berdasarkan kelompok umur pada grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa kelompok umur

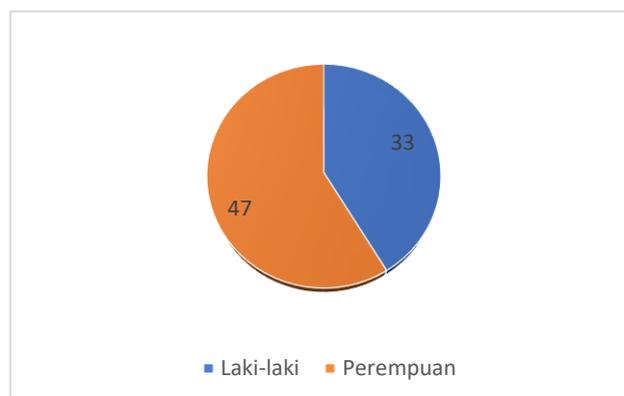
terbanyak diisi antara usia 31-40 tahun sejumlah 41 (empat puluh satu) orang atau sebesar 51,25 %.

**Gambar 1.1. Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2021**



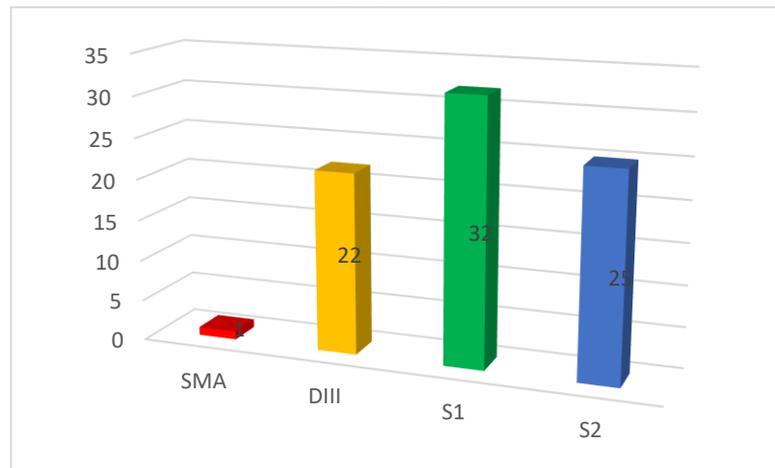
Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang berdasarkan jenis kelamin pada grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh pegawai wanita sejumlah 47 (empat puluh tujuh) orang atau sebesar 58,70%.

**Gambar 1.2. Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021**



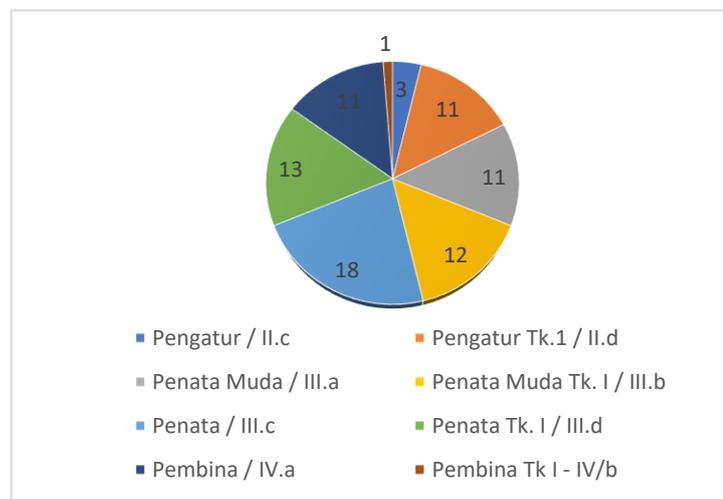
Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang berdasarkan pendidikan pada Grafik 1.4 dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh pegawai berpendidikan S1 sejumlah 32 (tiga puluh dua) orang atau sebesar 40%, sedangkan tingkat pendidikan pegawai paling rendah, yaitu SMA sederajat 1 (satu) orang pegawai sebesar 1%.

**Gambar 1.3. Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2021**



Jumlah pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang berdasarkan golongan pada grafik berikut ini dapat dilihat bahwa komposisi terbanyak diisi oleh pegawai golongan III sejumlah 54 (lima puluh empat) orang atau sebesar 68%.

**Gambar 1.4. Jumlah Pegawai KKP Palembang Berdasarkan Golongan Tahun 2021**



### 3) Struktur Organisasi

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Kementerian Kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 77 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Permenkes Nomor: 2348/Menkes/PER/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, dicantumkan bahwa Struktur Organisasi mengalami perubahan dari sebelumnya yang terdiri dari:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi;
3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan;
4. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah.

Berdasarkan SOTK baru Berubah menjadi:

1. Subbagian administrasi umum;
2. Instalasi;
3. Wilayah kerja;

**Gambar 1.5. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang**



Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.

Instalasi atau substansi merupakan unit pelayanan nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala KKP. Ada 3 Substansi di KKP Kelas II Palembang, yaitu:

- Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi (PKSE)
- Substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah (UKLW)
- Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan (PRL)

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dapat dibentuk Wilker KKP yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal. Wilker KKP merupakan unit pelayanan nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala KKP. Wilker KKP dipimpin oleh koordinator yang dibantu tugasnya oleh pejabat fungsional.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala KKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi kepala KKP masing-masing.

### **C. Potensi dan Permasalahan**

Perubahan gaya hidup dan peningkatan faktor resiko merupakan tantangan dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Oleh karena itu pengendalian penyakit memerlukan pendekatan yang komprehensif, antara lain dengan melaksanakan skrining faktor resiko, KIE, surveilans epidemiologi, pengembangan jejaring kerja, pengendalian faktor resiko berbasis masyarakat dan kegiatan pengendalian lainnya termasuk penanganan kasus sesuai standar.

Beberapa hal yang mendukung antara lain penerapan penganggaran berbasis kinerja dan progres pembinaan dari Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) Kementerian Kesehatan mulai meningkat. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) pusat, Kantor Kesehatan Pelabuhan tidak menjadi urusan pemerintah daerah sehingga tidak berpengaruh terhadap gejolak politik di daerah. Kedudukan dan perannya di daerah adalah sebagai institusi perwakilan Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan prinsip-prinsip kesetaraan, koordinasi horizontal, dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Adapun ancaman yang dihadapi adalah era globalisasi yang menyebabkan lalu lintas barang, jasa dan manusia semakin sulit untuk diawasi. Desentralisasi pemerintah menyebabkan terjadinya egoisme kedaerahan di wilayah kabupaten/kota, kondisi rawan kesehatan dalam negeri dan luar negeri yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Tuntutan dari pengguna jasa akan percepatan dan mutu pelayanan yang sangat tinggi sehingga menyebabkan tidak optimalnya proses pengawasan yang dikhawatirkan akan menyebabkan tidak terdeteksinya penyakit karantina dan penyakit menular lainnya. Jejaring kerja dengan pemerintah daerah juga belum optimal sehingga berpengaruh terhadap lemahnya sistem deteksi, respon, dan pelaporan terhadap masalah-masalah kedaruratan kesehatan yang terjadi di wilayah kabupaten/kota yang secara epidemiologis masalah tersebut berpotensi meresahkan dunia internasional.

Pencapaian kinerja tahun 2019, ada 2 indikator yang tidak mencapai target yaitu jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan 93,45% dan jumlah pengadaan sarana prasarana 97,56%. Kegagalan pencapaian target indikator pertama disebabkan karena penerbitan sertifikat dilakukan berdasarkan permintaan/permohonan yang diterima serta adanya peraturan pemerintah yang mengizinkan klinik/ rumah sakit yang memenuhi standar untuk melaksanakan vaksinasi serta penerbitan ICV menyebabkan berkurangnya jumlah masyarakat yang melaksanakan vaksinasi di KKP kelas II Palembang berimbas pada menurunnya jumlah penerbitan ICV. Namun upaya-upaya telah dilaksanakan dalam mencapai target jumlah sertifikat/surat izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan, tetap melaksanakan pelayanan penerbitan sertifikat dengan

maksimal serta meningkatkan pelayanan prima ditunjang dengan perbaikan ruang tunggu dan sistem pelayanan.

Pada indikator kedua, kegagalan disebabkan oleh beberapa barang yang akan dibeli ada yang belum terbit di e-katalog LKPP hingga bulan Juni, belum memiliki SDM yang berpengalaman Lelang di LPSE, baik dalam persiapan pembuatan dokumen maupun pelaksanaan lelangnya, pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia tidak sesuai jadwal dan terdapat penyedia wanprestasi pada pengadaan genset listrik. Namun upaya-upaya telah dilaksanakan dalam mencapai target, diantaranya menyusun rencana untuk pelaksanaan pengadaan alternative, seperti lelang umum dan lelang cepat, melakukan konsultasi ke pusat dan sharing pengalaman dari teman-teman di Kantor Kesehatan Pelabuhan lainnya, memberikan surat peringatan atau sanksi kepada penyedia yang melakukan pekerjaan tidak sesuai jadwal dan memberikan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan dan pengajuan ke daftar hitam.

Pada tahun 2020 ini, seperti kita ketahui bahwa terdapat pandemi covid-19 yang mengancam seluruh dunia. Dengan adanya pandemi ini, mengubah pola hidup masyarakat. Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai unit kerja yang bertugas menjaga pintu masuk negara ikut berperan dalam cegah tanggal masuknya virus Covid-19 melalui skrining penumpang, kru pesawat dan Anak Buah Kapal (ABK).

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **A. Visi dan Misi**

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yaitu peningkatan kualitas manusia Indonesia, penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya dan sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi presiden tahun 2020-2024, melalui menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan angka *stunting* pada balita, memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan nasional dan meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

#### **B. Tujuan**

Untuk mencapai tujuan strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 khususnya tujuan strategis Ditjen pencegahan dan Pengendalian penyakit dalam Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang memiliki

tujuan strategis yaitu yaitu meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100% pada akhir tahun 2024.

Tujuan tersebut akan diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Dukungan Pelayanan Kekejarantinaaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

### **C. Sasaran Strategis**

Dalam menyelaraskan dengan sasaran strategis pada Renstra Kemenkes 2020-2024 dan untuk mencapai tujuan strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II Palembang, ditetapkan sasaran strategis, yaitu:

- I. Meningkatnya pelayanan kekarantinaaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024, dengan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai berikut:
  1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaaan kesehatan sejumlah 2.840.726 pada tahun 2024
  2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 100% pada tahun 2024
  3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 90% pada tahun 2024
- II. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pencegahan dan pengendalian penyakit sebesar 100% pada akhir tahun 2024 dengan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  1. Nilai kinerja anggaran sebesar 100% pada tahun 2024
  2. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 100% pada tahun 2024
  3. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 90% pada tahun 2024
  4. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 100% pada tahun 2024.

## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI**

#### **A. Arah Kebijakan**

Arah kebijakan dan strategi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang adalah mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P serta Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi ditetapkan arah kebijakan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang sebagai berikut :

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko
2. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia
4. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program

#### **B. Strategi**

Seperti yang telah ditetapkan di Bab sebelumnya, bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang telah menetapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020-2024 serta mengacu pada strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut:

1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko
2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko
3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko
4. Peningkatan komunikasi dan advokasi
5. Penguatan akuntabilitas
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
7. Kerjasama lintas sektor dan program

#### **C. Kerangka Regulasi**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan

dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan.

Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain:

- 1) SOP Kegiatan Keekarantinaan
- 2) SOP Kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan
- 3) SOP Kegiatan Upaya Kesehatan Pelabuhan Dan Lintas Wilayah
- 4) SOP Pengendalian Gratifikasi
- 5) SOP Pelaporan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
- 6) SOP Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*)
- 7) SOP Pelaporan Bulanan
- 8) SOP Pengamanan Asset
- 9) SOP Mekanisme Penyetoran PNBK
- 10) SOP Operasional Klinik pada Kegiatan Embarkasi Haji
- 11) SOP Operasional Laboratorium pada Kegiatan Embarkasi Haji
- 12) SOP Logistik pada Kegiatan Embarkasi Haji
- 13) SOP Pemeriksaan Akhir pada Kegiatan Embarkasi Haji
- 14) SOP Pengelolaan Sarana pada Kegiatan Embarkasi Haji
- 15) SOP Pengendalian Arsip pada Kegiatan Embarkasi Haji
- 16) SOP Pengendalian Dokumen pada Kegiatan Embarkasi Haji
- 17) SOP Pengendalian Risiko Lingkungan pada Kegiatan Embarkasi Haji
- 18) SOP Surveilans Epidemiologi pada Kegiatan Embarkasi Haji
- 19) SOP Siskohat pada Kegiatan Embarkasi Haji

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang, beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain:

- 1) SOP Pemeriksaan Sanitasi Pesawat
- 2) SOP Pemeriksaan Kesehatan Kapal

- 3) SOP Pemeriksaan Barang
- 4) SOP Penyampaian Laporan Keuangan
- 5) SOP Penilaian Kinerja Anggaran
- 6) SOP Implementasi WBK

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KEGIATAN**

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024, tujuan, arah kebijakan, strategi dan sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun 2020-2024.

**A. Target Kinerja**

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

**Tabel 4.1**

**Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis RAK  
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun 2020-2024**

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya Pelayanan Kekearifan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan	1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekearifan kesehatan	2.347.506	701.381	701.381	2.714.816	2.840.726
			2. Persentase faktor resiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut,	90%	95%	97%	95%	100%

			barang dan lingkungan					
			3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	90%	95%	90%	90%
			4. Nilai kinerja anggaran	80%	83%	85%	95%	100%
			5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	80%	93%	93%	95%	100%
			6. Kinerja implementasi WBK satker	70%	72%	75%	85%	90%
			7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	40%	80%	90%	100%

## B. Kegiatan

Dalam rangka menjamin tercapainya tujuan strategis, sasaran strategis dan indikator sasaran strategis, maka ditetapkan sasaran program, indikator kinerja program, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan rencana aksi kegiatan 2020-2024.

Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang adalah meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan, Untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan

Kegiatan yang dilakukan:

- 1) Pelayanan kesehatan haji embarkasi dalam kota

- 2) Pelayanan kesehatan haji debarkasi dalam kota
  - 3) Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan embarkasi LS/LP
  - 4) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan penjamah makanan
  - 5) Evaluasi pelaksanaan embarkasi haji
  - 6) Verifikasi dan pengawasan klinik vaksinasi
  - 7) Pengawasan COVID-19/ Faktor Risiko PHEIC lainnya di pintu masuk negara
  - 8) Vaksinasi mobile Covid 19/ Faktor risiko PHEIC lainnya di Pintu masuk negara
  - 9) Pengawasan dan peningkatan kualitas air minum
  - 10) Pengawasan sarana pengolahan air bersih dan kualitas air bersih
  - 11) Pengawasan TPM dan kualitas makanan
  - 12) Pemeriksaan sanitasi lingkungan di wilker
  - 13) Pemeriksaan deteksi dini TBC di Wilker
  - 14) Layanan pengendalian faktor risiko penyakit di pelabuhan penyeberangan
  - 15) Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara
  - 16) Layanan kesehatan pada situasi khusus
  - 17) Survei jentik
  - 18) Survei nyamuk
  - 19) Survei vektor diare
  - 20) Layanan deteksi dini terduga TBC
  - 21) Pelayanan kegawatdaruratan dan rujukan
  - 22) Bahan pelayanan kekarantinaan kesehatan
  - 23) Pelatihan/workshop petugas kesehatan lintas wilayah
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
- Kegiatan yang dilakukan:
- 1) Uji resistensi insektesida di wilayah kerja
  - 2) Pemeriksaan deteksi dini HIV AIDS di wilker
  - 3) Pengendalian vektor DBD

- 4) Layanan survei vektor PES
  - 5) Pengendalian vektor diare
  - 6) Pelaksanaan survei vektor DBD
  - 7) Pelaksanaan pencegahan pengendalian HIV/AIDS
3. Indeks pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara
- Kegiatan yang dilakukan:
- 1) Deteksi dini penyakit potensial PHEIC/Pandemi melalui kegiatan surveillans faktor risiko dan jejaring kerja
  - 2) Pengawasan faktor risiko kesehatan bagi pelaku perjalanan di wilayah kerja
4. Nilai kinerja anggaran
- Kegiatan yang dilakukan:
- 1) Sarana dan prasarana pengendalian vektor
  - 2) Pengadaan buletin karantina kesehatan pelabuhan, bandah udara dan PLBDN
  - 3) Penyusunan e-renggar
  - 4) Penyusunan rencana umum pengadaan
  - 5) Penyusunan dokumen perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan
  - 6) Koordinasi penyusunan dokumen perbendaharaan dan pertanggungjawaban keuangan
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
- Kegiatan yang dilakukan:
- 1) Pembayaran gaji dan tunjangan
  - 2) Pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan dan revisi anggaran
  - 3) Penyusunan dokumen RKAKL
  - 4) Penyusunan realisasi anggaran triwulan/semester/tahunan
  - 5) Verifikasi dan rekonsiliasi LK UAPPA E1

- 6) Rekonsiliasi pengelolaan PNB
6. Kinerja implementasi WBK Satker  
Kegiatan yang dilakukan:
  - 1) Rapat pertemuan koordinasi LS/LP
  - 2) Konsultasi teknis ke pusat
  - 3) Konsultasi terkait inventarisasi DUMAS
  - 4) Pengelolaan UPG
  - 5) Penguatan pelaksanaan Tugas dan Fungsi PPNS
  - 6) Rapat persiapan penilaian WBK
  - 7) Penyusunan dan Monev SOP AP
  - 8) Pemeriksaan kesehatan ASN
  - 9) Bimbingan teknis ke wilayah kerja
  - 10) Penyusunan RAK 2020-2024
  - 11) Penyusunan laporan indikator RAK
  - 12) Penyusunan laporan e-monev penganggaran
  - 13) Penyusunan laporan e-monev Bappenas/ PP 39 tahun 2006
  - 14) Penyusunan laporan tahunan satker
  - 15) Penyusunan profil satker
  - 16) Penyusunan LAKIP dan perjanjian kerja
  - 17) Evaluasi SAKIP (Undangan pusat)
  - 18) Pengelolaan arsip aktif dan inaktif
  - 19) Pengelolaan kantor berhias
  - 20) Media KIE
  - 21) Pemeliharaan gedung dan kantor
  - 22) Perbaikan dan pemeliharaan peralatan kantor
  - 23) Perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6/8
  - 24) Langgan daya dan jasa
  - 25) Sewa gedung kantor wilker TAA
  - 26) Operasional perkantoran
  - 27) Tenaga honorer
  - 28) Pelaksana pengelola satker
  - 29) Fasilitas perkantoran

- 30) Fasilitas pendukung kekarantinaan kesehatan
  - 31) Pemeliharaan dan perbaikan alat pelayanan dan pendukung kekarantinaan kesehatan
  - 32) Analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai
7. Persentase peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL
- Kegiatan yang dilakukan:
- 1) Diklat EPID ahli
  - 2) Peningkatan kapasitas bidang epidemiolog kesehatan
  - 3) Peningkatan kapasitas bidang entomolog/sanitarian.

### **C. Kerangka Pendanaan**

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target sasaran kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

**Tabel 4.2**  
**Kerangka Pendanaan**

No	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (,000)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>KKP Kelas II Palembang</b>											
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	2.347.506	701.381	701.381	2.714.816	2.840.726	271.800	79.776	299.660	314.644	330.376
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	97%	95%	100%	1.181.407	1.906.315	1.302.503	1.367.627	1.436.009
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	90%	95%	90%	90%	1.420.474	1.112.479	1.566.074	1.644.381	1.726.601
4	Nilai kinerja anggaran	80	83	85	95	100	108.108	563.478	119.190	125.150	131.408
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80	93	93	95	100	109.290.000	71.531	120.492	126.516	132.842
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	72	75	85	90	13.800.784	12.743.951	15.215.368	15.976.133	16.774.941
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	40%	80%	90%	100%	108.964		156.909	188.290	225.947

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, Bidang/ seksi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode lima tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua Seksi di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang, oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Palembang, upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

## PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Koordinator Substansi PKSE Koordinator Substansi PRL Koordinator Substansi UKLW
		2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Koordinator Substansi PKSE Koordinator Substansi PRL
		3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Koordinator Substansi PKSE Koordinator Substansi PRL
		4	Nilai kinerja anggaran	Kepala subbagian Administrasi Umum
		5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	Kepala subbagian Administrasi Umum
		6	Kinerja implementasi WBK satker	Kepala subbagian Administrasi Umum
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Kepala subbagian Administrasi Umum

## MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN

TAHUN 2020 – 2024

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO)	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan	Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan yang dilakukan	Akumulasi jumlah pemeriksaan penapisan orang, pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina, pemeriksaan barang dan pemeriksaan lingkungan (TTU, TPM, air dan udara)	2.347.506	701.381	701.381	2.714.816	2.840.726
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada indikator no. 1	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun (pada indikator no.1)	90%	95%	97%	95%	100%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Pengendalian faktor risiko lingkungan di wilayah kerja KKP Palembang	Akumulasi persentase target dan capaian: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelengkapan data surveilans</li> <li>2. Sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam,</li> <li>3. Penyusunan dokumen renkon yang baru (kumulatif dokumen renkon, tidak termasuk reviu) berdasarkan pintu masuk negara</li> <li>4. Indeks pinjal <math>\leq 1</math> (pelabuhan/bandara)</li> <li>5. HI perimeter = 0 (pelabuhan/bandara)</li> <li>6. Tidak ditemukan larva anopheles (pelabuhan/bandara)</li> <li>7. Kepadatan kecoa rendah (pelabuhan/bandara)</li> <li>8. Kepadatan lalat <math>&lt; 2</math> (pelabuhan/bandara)</li> <li>9. TTU memenuhi syarat (titik)</li> <li>10. TPM layak higiene (titik)</li> <li>11. Kualitas air bersih memenuhi syarat (titik)</li> </ol> Kesebelas persentasi parameter dijumlahkan dan dibagi 11 dikali 100%.	85%	90%	95%	90%	90%
4	Nilai kinerja anggaran	Laporan kinerja pada emonev DJA	Realisasi volume kegiatan / target volume kegiatan x realisasi indikator kegiatan / target indikator kegiatan.  Dalam pelaksanaan penilaian Indikator Kinerja Anggaran, secara otomatis dilakukan oleh sistem yakni aplikasi e-Monev DJA.	80	83	85	95	100
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kepatuhan dalam menyampaikan laporan pada aplikasi ON SPAN	Dalam penyusunan IKPA terdapat 13 Indikator untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran yaitu dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan Anggaran,	80	93	93	95	100

			kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.  Dalam pelaksanaan penilaian IKPA, secara otomatis dilakukan oleh sistem yakni aplikasi OM SPAN					
6	Kinerja implementasi WBK satker	Penilaian kinerja WBK KKP Kelas II Palembang	Nilai implementasi WBK Satker dihitung dari akumulasi Nilai Total Pengungkit dan Nilai Total Hasil	70	72	75	85	90
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	45%	40%	80%	90%	100%